

## IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PASAMAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENDIDIKAN GRATIS PERSPEKTIF SIYASAH TANFIZIYAH (STUDI KASUS DI NAGARI LANSEK KADOK)

### Implementation of Pasaman Regency Regional Regulation Number 3 of 2017 on Free Education from the Perspective of Siyasaḥ Tanfiziyah (A Case Study in Nagari Lansek Kadok)

Bunga Vajar Lestari & Sofia Ridha

UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

fajarlestaribunga@gmail.com; sofiaridha@uinbukittinggi.ac.id

#### Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 24, 2026	Jun 21, 2026	Jul 3, 2026	Jul 8, 2026

#### Abstract

The free education policy is an important instrument in ensuring access to education for society; however, its implementation still faces challenges at the local level, as reflected in the continued presence of junior secondary school-age children who have dropped out of school in Nagari Lansek Kadok. This study aims to analyze the implementation of Pasaman Regency Regional Regulation Number 3 of 2017 concerning Free Education, identify the factors inhibiting its implementation, and examine the policy from the perspective of *Siyasaḥ Tanfiziyah*. This study used a qualitative approach with a descriptive design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were then analyzed through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing. The results show that the free education policy at the junior secondary school level in Nagari Lansek Kadok has been implemented, but it has not yet run optimally because some students still drop out of

school. The main obstacles to the implementation of this policy include low public awareness of the importance of education, insufficient policy socialization, geographical conditions, limited educational support facilities, and the suboptimal role of the nagari government and coordination among stakeholders. From the perspective of *Siyasah Tanfiẓiyah*, the implementation of the free education policy has not fully reflected the principles of public benefit, justice, and government responsibility in fulfilling and guaranteeing the community's right to education. The conclusion of this study emphasizes that the effectiveness of the free education policy requires strengthened socialization, an enhanced role of the nagari government, and more optimal coordination among implementing actors so that the goal of fulfilling the community's right to education can be achieved more equitably.

**Keywords:** Policy Implementation; Free Education; *Siyasah Tanfiẓiyah*; School Dropout; Right to Education

**Abstrak:** Kebijakan pendidikan gratis merupakan instrumen penting dalam menjamin akses pendidikan bagi masyarakat, namun implementasinya masih menghadapi tantangan di tingkat lokal, sebagaimana terlihat pada masih ditemukannya anak usia sekolah tingkat Sekolah Menengah Pertama yang putus sekolah di Nagari Lansek Kadok. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis, mengidentifikasi faktor-faktor penghambat implementasinya, serta meninjau kebijakan tersebut dalam perspektif *Siyasah Tanfiẓiyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan gratis pada tingkat Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok telah dilaksanakan, tetapi belum berjalan secara optimal karena masih terdapat siswa yang putus sekolah. Hambatan utama dalam implementasi kebijakan tersebut meliputi rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, kurangnya sosialisasi kebijakan, kondisi geografis, keterbatasan sarana pendukung pendidikan, serta belum optimalnya peran pemerintah nagari dan koordinasi antarpemangku kepentingan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfiẓiyah*, implementasi kebijakan pendidikan gratis tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi serta menjamin hak masyarakat untuk memperoleh pendidikan. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kebijakan pendidikan gratis memerlukan penguatan sosialisasi, peningkatan peran pemerintah nagari, dan koordinasi yang lebih optimal antaraktor pelaksana agar tujuan pemenuhan hak pendidikan masyarakat dapat tercapai secara lebih merata.

**Kata Kunci:** Implementasi Kebijakan; Pendidikan Gratis; *Siyasah Tanfiẓiyah*; Putus Sekolah; Hak Pendidikan

## PENDAHULUAN

Pendidikan adalah hak dasar setiap warga negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memenuhinya. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 5 Ayat (1) yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi (Gunawan, 2020; Nureni et al., 2026).

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menjalankan berbagai program pendidikan gratis guna memperluas kesempatan masyarakat dalam memperoleh pendidikan, terutama bagi keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Kebijakan pendidikan gratis hadir sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah dalam mengurangi beban biaya pendidikan serta menekan angka putus sekolah yang masih menjadi persoalan di Indonesia (Lorensa et al., 2024). Kebijakan pendidikan gratis lahir karena masih banyak masyarakat berpenghasilan rendah yang mengalami kesulitan dalam memperoleh akses pendidikan akibat tingginya biaya sekolah (Susanto et al., 2025). Di samping itu, kondisi ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka putus sekolah di Indonesia. (Freddy Sanda & Nurhizrah Gistituati, 2023). Penelitian Sulfiani et al tahun 2025, menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan pendidikan anak. (Sulfiani et al., 2025).

Penelitian ini penting dilakukan karena pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses belajar di sekolah, tetapi juga berhubungan dengan masa depan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila anak tidak memperoleh pendidikan yang layak, maka peluang mereka untuk meningkatkan kualitas hidup akan semakin terbatas. Oleh sebab itu, pemerintah memiliki peran penting dalam memastikan seluruh anak memperoleh hak pendidikan secara merata tanpa terkendala kondisi ekonomi maupun lingkungan sosial. Kebijakan pendidikan gratis pada dasarnya merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam menciptakan pemerataan pendidikan di masyarakat. Dengan adanya kebijakan tersebut, diharapkan seluruh anak usia sekolah dapat melanjutkan pendidikan tanpa harus terbebani biaya sekolah. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan tersebut masih menghadapi berbagai hambatan sehingga tujuan yang telah ditetapkan belum dapat tercapai secara optimal. Kondisi ini terlihat dari masih ditemukannya siswa yang putus sekolah walaupun program pendidikan gratis telah dijalankan oleh pemerintah daerah.

Di samping itu, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya bergantung pada keberadaan peraturan, tetapi juga ditentukan oleh sinergi dan kerja sama antara pemerintah, pihak sekolah, keluarga, serta masyarakat. Kurangnya sosialisasi mengenai program pendidikan gratis menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami secara jelas bentuk bantuan yang diberikan pemerintah. Di samping itu, rendahnya kesadaran sebagian orang tua terhadap pentingnya pendidikan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keberlanjutan pendidikan anak. Komitmen Pemerintah Kabupaten

Pasaman dalam mewujudkan pemerataan pendidikan diwujudkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis. Kebijakan tersebut dirancang untuk mengurangi beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat sekaligus meningkatkan angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan sekolah menengah pertama. Namun, pada pelaksanaannya masih ditemukan anak usia sekolah yang putus sekolah meskipun kebijakan pendidikan gratis telah diberlakukan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman tahun 2025 menunjukkan bahwa di Kecamatan Rao Selatan terdapat 72 siswa tingkat SMP yang mengalami putus sekolah, dan Nagari Lansek Kadok menjadi wilayah dengan angka putus sekolah tertinggi, yaitu sebanyak 38 siswa. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat perbedaan antara tujuan yang ingin dicapai melalui kebijakan pendidikan gratis dengan pelaksanaannya di lapangan.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis sebelumnya telah banyak dilakukan. Implementasi kebijakan pendidikan gratis belum berjalan optimal akibat keterbatasan anggaran dan lemahnya pemahaman pelaksana kebijakan. (Agustina, 2025) Keberhasilan program pendidikan gratis sangat dipengaruhi oleh aspek perencanaan, koordinasi, dan pengawasan pemerintah daerah. (Sadia et al., 2019). Penelitian Agustin menunjukkan bahwa faktor ekonomi, lingkungan keluarga, dan rendahnya motivasi belajar masih menjadi penyebab anak putus sekolah meskipun kebijakan pendidikan gratis telah diterapkan. (Agustin et al., 2024).

Berbeda dari penelitian-penelitian terdahulu, penelitian ini secara khusus mengkaji implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis pada jenjang Sekolah Menengah Pertama di Nagari Lansek Kadok dengan ditinjau dari perspektif Siyasaah Tanfiziyah. Dalam perspektif fiqh siyasaah, Siyasaah Tanfiziyah menekankan tanggung jawab pemerintah dalam melaksanakan kebijakan secara adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Siyasaah tanfiziyah berfungsi sebagai instrumen evaluatif untuk menilai apakah pelaksanaan kebijakan pemerintah telah mencerminkan prinsip keadilan serta kemaslahatan umum. (Saputra, 2025).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017, mengkaji faktor-faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaannya, serta meninjaunya

berdasarkan perspektif Siyasaḥ Tanfiziyyah di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 serta meninjaunya dalam perspektif Siyasaḥ Tanfiziyyah. Pendekatan ini digunakan untuk memahami dan menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan secara mendalam. (Rusandi & Rusli, 2021).

Penelitian ini dipilih menggunakan metode kualitatif karena peneliti ingin memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kondisi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di masyarakat. Melalui metode ini, peneliti dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai pelaksanaan kebijakan di lapangan serta berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapannya, serta tanggapan masyarakat terhadap program pendidikan gratis yang diterapkan pemerintah daerah. Dengan demikian, data yang diperoleh tidak hanya berupa angka, tetapi juga berupa penjelasan dan pengalaman dari para informan penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan normatif teologis sebagai landasan dalam menganalisis permasalahan yang diteliti. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan pendidikan gratis dilaksanakan dalam praktik pemerintahan daerah dan dampaknya terhadap masyarakat. Pendekatan yuridis sosiologis digunakan untuk mengkaji hukum dalam praktik sosial masyarakat. Sementara itu, pendekatan normatif teologis digunakan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip Siyasaḥ Tanfiziyyah, seperti keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan kebijakan publik. (Huda, 2021).

Pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan praktik pelaksanaannya di tengah masyarakat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat mengetahui apakah kebijakan pendidikan gratis telah berjalan sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017. Sementara itu, pendekatan normatif teologis digunakan untuk meninjau pelaksanaan kebijakan berdasarkan nilai-nilai Islam, khususnya dalam perspektif Siyasaḥ

Tanfiziyah yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Sumatera Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya siswa tingkat Sekolah Menengah Pertama yang mengalami putus sekolah meskipun kebijakan pendidikan gratis telah diterapkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasaman melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017.

Pemilihan Nagari Lansek Kadok sebagai lokasi penelitian dilakukan karena wilayah tersebut memiliki jumlah siswa putus sekolah tingkat SMP yang cukup tinggi dibandingkan wilayah lain di Kecamatan Rao Selatan. Kondisi tersebut menjadikan Nagari Lansek Kadok sebagai lokasi yang relevan untuk meneliti pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis serta berbagai faktor yang memengaruhi munculnya hambatan dalam proses implementasi kebijakan tersebut.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, kepala sekolah, guru, serta orang tua atau wali murid penerima manfaat kebijakan pendidikan gratis. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti dokumen resmi pemerintah, Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017, buku, jurnal ilmiah, serta literatur lain yang relevan dengan kebijakan pendidikan gratis dan Siyasa Tanfiziyah. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian, sedangkan data sekunder berasal dari berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. (Sulung & Muspawi, 2021)

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti melakukan wawancara langsung dengan sejumlah informan guna memperoleh informasi yang akurat dan mendalam. Selanjutnya, data yang diperoleh dari wawancara dicocokkan dengan hasil dokumentasi dan observasi untuk memastikan validitas data serta kesesuaiannya dengan kondisi yang ada di lapangan. Melalui observasi, peneliti dapat melihat secara langsung kondisi masyarakat dan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di lingkungan penelitian.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk melihat secara langsung kondisi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di lapangan. Wawancara dilakukan guna memperoleh informasi

yang lebih mendalam dari para informan mengenai implementasi kebijakan pendidikan gratis beserta berbagai kendala yang dihadapi. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data pendukung berupa arsip, laporan, serta dokumen resmi yang relevan dengan penelitian.

Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk memperoleh pemahaman yang sistematis mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis ditinjau dari perspektif Siyash Tanfiziyah.

Proses analisis data dilakukan sejak data mulai dikumpulkan. Data yang telah diperoleh kemudian dipilih dan disusun sesuai dengan fokus penelitian, lalu disajikan dalam bentuk uraian yang terstruktur. Melalui proses tersebut, peneliti dapat menarik kesimpulan mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dan kajiannya dalam perspektif Siyash Tanfiziyah di Nagari Lansek Kadok.

## **HASIL**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis di Nagari Lansek Kadok pada jenjang Sekolah Menengah Pertama telah dilaksanakan melalui pembebasan biaya pendidikan formal, penyediaan Lembar Kerja Siswa (LKS) secara gratis, serta pemberian bantuan pakaian sekolah bagi peserta didik kurang mampu.

Kebijakan tersebut memberikan manfaat dalam mengurangi beban biaya pendidikan masyarakat dan memperluas akses pendidikan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena bantuan perlengkapan sekolah belum diterima secara merata oleh seluruh siswa, sementara masyarakat masih harus menanggung biaya tidak langsung, seperti pembelian alat tulis, buku pendukung, dan biaya transportasi menuju sekolah. Meskipun masyarakat masih menanggung beberapa biaya tidak langsung seperti alat tulis dan transportasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi tersebut bukan merupakan faktor dominan penyebab putus sekolah. Koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, dan pihak sekolah dalam pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi program masih belum maksimal sehingga tujuan kebijakan untuk menekan angka putus sekolah belum tercapai secara optimal.

Hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa faktor penghambat, yaitu rendahnya pemahaman masyarakat mengenai

program pendidikan gratis akibat kurangnya sosialisasi, rendahnya kesadaran orang tua dan siswa terhadap pentingnya pendidikan sehingga anak lebih memilih bekerja daripada sekolah, serta kondisi geografis berupa jarak sekolah yang relatif jauh dengan akses jalan yang belum memadai. Di samping itu, keterbatasan fasilitas pendukung belajar di rumah, seperti perlengkapan belajar dan sarana transportasi, turut memengaruhi motivasi belajar siswa. Berdasarkan perspektif Siyasaḥ Tanfiziyah, implementasi kebijakan pendidikan gratis telah menunjukkan adanya tanggung jawab pemerintah dalam penyediaan layanan pendidikan, namun belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah karena masih terdapat hambatan yang membatasi pemerataan akses pendidikan bagi seluruh masyarakat.

Visualisasi data penelitian disajikan dalam bentuk uraian hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang menggambarkan kondisi implementasi kebijakan di lapangan. Data penelitian memperlihatkan bahwa pembebasan biaya pendidikan telah terlaksana, tetapi masih terdapat siswa yang mengalami putus sekolah. Temuan tersebut didukung oleh data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pasaman Tahun 2025 yang menunjukkan bahwa Kecamatan Rao Selatan memiliki 72 siswa SMP putus sekolah, dengan Nagari Lansek Kadok sebagai wilayah dengan angka tertinggi, yaitu sebanyak 38 siswa. Hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan, pihak sekolah, serta orang tua siswa memperkuat temuan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan masih dipengaruhi oleh faktor sosial, geografis, rendahnya sosialisasi, dan belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Data negatif atau anomali dalam penelitian ini terlihat dari adanya ketidaksesuaian antara tujuan kebijakan pendidikan gratis dengan kondisi nyata di lapangan. Meskipun biaya pendidikan formal telah dibebaskan, masih ditemukan siswa yang memilih berhenti sekolah karena bekerja, rendahnya motivasi belajar, kurangnya dukungan keluarga, serta biaya pendidikan tidak langsung yang masih harus ditanggung masyarakat. Selain itu, belum optimalnya sosialisasi kebijakan dan pengawasan terhadap siswa yang berisiko putus sekolah menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum mampu sepenuhnya menghilangkan hambatan akses pendidikan. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa keberadaan kebijakan pendidikan gratis saja belum cukup untuk menekan angka putus sekolah tanpa didukung pengawasan, pendampingan, dan kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, pihak sekolah, dan masyarakat. , ini sudah bagus belum

## PEMBAHASAN

### Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis Di Nagari Lansek Kadok

Implementasi kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 yang bertujuan memberikan kesempatan pendidikan yang merata bagi masyarakat. Kebijakan tersebut meliputi pembebasan biaya pendidikan pada tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama yang didanai melalui anggaran pemerintah daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Pasaman, kebijakan pendidikan gratis ini bertujuan untuk meringankan beban biaya pendidikan yang ditanggung masyarakat serta memperluas akses pendidikan bagi seluruh anak usia sekolah.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok pada dasarnya telah berjalan, khususnya dalam pembebasan biaya sekolah dan penyediaan buku Lembar Kerja Siswa (LKS) secara gratis. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan bantuan pakaian sekolah bagi siswa kurang mampu. Namun, pelaksanaan bantuan tersebut belum sepenuhnya merata sehingga masih terdapat siswa yang belum menerima bantuan perlengkapan sekolah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan di tingkat masyarakat masih belum terlaksana secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat masih harus mengeluarkan biaya tambahan seperti pembelian perlengkapan sekolah, buku tulis, dan biaya transportasi menuju sekolah. Hal tersebut menunjukkan bahwa meskipun biaya sekolah telah dibebaskan, masih terdapat beberapa kebutuhan penunjang pendidikan yang harus dipenuhi oleh masyarakat. (Sasmiharti, 2023). Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, hambatan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok bukan terletak pada biaya tersebut, melainkan pada rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan.

Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pendidikan gratis juga menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan kebijakan tersebut (Affriliani, 2025). Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memahami secara jelas bentuk bantuan yang diberikan pemerintah dalam program pendidikan gratis. Kurangnya sosialisasi menyebabkan masyarakat belum sepenuhnya memanfaatkan kebijakan tersebut secara optimal.

Faktor lain yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan adalah rendahnya kesadaran sebagian siswa dan orang tua mengenai pentingnya pendidikan (Maskhuroh & Hasib, 2025). Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat siswa yang memilih berhenti sekolah karena kurangnya motivasi belajar serta minimnya dorongan dari keluarga. Selain itu, sebagian anak memilih bekerja karena telah memperoleh penghasilan sendiri sehingga pendidikan dianggap kurang penting dibandingkan kebutuhan ekonomi jangka pendek. Penelitian Agustin dkk. menunjukkan bahwa faktor ekonomi dan rendahnya motivasi belajar menjadi penyebab utama anak putus sekolah. (Agustin et al., 2024). Namun, hasil penelitian di Nagari Lansek Kadok menunjukkan kondisi yang berbeda, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan serta kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan pendidikan gratis lebih dominan memengaruhi keberlanjutan pendidikan anak.

Kondisi geografis juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok. Jarak sekolah yang cukup jauh serta kondisi akses jalan yang belum memadai menyebabkan sebagian siswa mengalami kesulitan dalam melanjutkan pendidikan secara rutin. Di samping itu, peran pemerintah nagari dalam melakukan sosialisasi dan pendampingan kepada masyarakat juga belum berjalan optimal. Kurangnya komunikasi antara pemerintah nagari dan masyarakat menyebabkan informasi mengenai kebijakan pendidikan gratis belum tersampaikan secara menyeluruh.

Di samping itu, keberhasilan pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis sangat bergantung pada adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pihak sekolah, dan masyarakat (Muchid & Utami, 2026). Berdasarkan hasil penelitian, koordinasi antar pelaksana kebijakan di Nagari Lansek Kadok masih belum berjalan secara maksimal. Sekolah pada dasarnya telah melaksanakan kebijakan sesuai arahan pemerintah daerah, namun pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program masih terbatas. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kendala di lapangan belum dapat ditangani secara cepat, terutama terkait siswa yang berisiko mengalami putus sekolah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan publik menuntut adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat agar tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif. (Sadia et al., 2019).

Di sisi lain, keluarga memegang peranan penting dalam menentukan keberlanjutan pendidikan anak. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang tua siswa, masih terdapat masyarakat yang belum menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama. Sebagian orang tua menganggap bahwa setelah anak mampu membantu pekerjaan keluarga,

pendidikan tidak lagi menjadi kebutuhan yang mendesak. (Sulfiani et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan masih menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Selain itu, kurangnya sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 menyebabkan sebagian masyarakat belum memahami tujuan, manfaat, dan ruang lingkup kebijakan pendidikan gratis yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Akibatnya, meskipun kebijakan tersebut telah diterapkan, masih terdapat anak yang tidak melanjutkan pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah Pertama. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan gratis tidak hanya bergantung pada tersedianya regulasi, tetapi juga pada peningkatan kesadaran masyarakat serta efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Selain faktor sosial, keterbatasan sarana pendukung pendidikan juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis (Vilanti et al., 2026). Berdasarkan hasil penelitian, masih ditemukan siswa yang mengalami keterbatasan dalam memperoleh fasilitas belajar yang memadai di rumah, seperti perlengkapan alat tulis, buku pendukung pembelajaran, serta sarana transportasi yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan sebagian siswa kurang termotivasi dalam mengikuti proses pembelajaran secara optimal. Walaupun biaya sekolah telah dibebaskan oleh pemerintah, kebutuhan penunjang pendidikan lainnya masih menjadi beban bagi sebagian masyarakat kurang mampu.

Dalam perspektif implementasi kebijakan publik, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh adanya regulasi, tetapi juga oleh sejauh mana kebijakan tersebut mampu menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat (Sutmasa, 2021). Kebijakan pendidikan gratis di Kabupaten Pasaman pada dasarnya telah memberikan dampak positif karena mampu membantu masyarakat dalam mengurangi biaya pendidikan formal. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan kebijakan untuk menekan angka putus sekolah belum sepenuhnya tercapai karena masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok masih memerlukan perhatian lebih dari pemerintah daerah, pemerintah nagari, serta pihak sekolah. Diperlukan peningkatan pengawasan, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta pendampingan terhadap siswa yang berisiko putus sekolah. Di samping itu, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat perlu diperkuat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Dengan

terjalinnnya kerja sama yang efektif antara seluruh pemangku kepentingan, pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis diharapkan mampu mencapai tujuan pemerataan pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah secara maksimal.

### **Analisis Perspektif Siyasa Tanfiziyah**

Dalam perspektif Siyasa Tanfiziyah, pemerintah berkewajiban melaksanakan kebijakan secara adil serta mengutamakan kemaslahatan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan tidak hanya diukur dari adanya peraturan yang mengaturnya, tetapi juga dari efektivitas penerapan serta manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Siyasa tanfiziyah menekankan pelaksanaan kebijakan pemerintah yang berlandaskan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintahan. (Pujangga & Santoso, 2025)

Jika ditinjau dari aspek normatif, Pemerintah Kabupaten Pasaman telah berupaya memenuhi prinsip pemerataan pendidikan melalui kebijakan pendidikan gratis. Berdasarkan hasil penelitian, implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya merealisasikan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan yang menjadi tujuan pelaksanaannya. Meskipun biaya pendidikan formal telah dibebaskan, masih terdapat kebutuhan penunjang pendidikan yang harus dipenuhi masyarakat. Akan tetapi, hasil penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama implementasi kebijakan bukan terletak pada biaya tersebut, melainkan pada rendahnya kesadaran masyarakat serta belum optimalnya sosialisasi kebijakan.

Selain itu, minimnya sosialisasi kebijakan menunjukkan bahwa tanggung jawab pemerintah dalam memastikan masyarakat memahami serta memperoleh manfaat dari kebijakan yang telah ditetapkan masih belum berjalan secara optimal. Dalam perspektif Siyasa Tanfiziyah, pemerintah tidak hanya berperan dalam menetapkan kebijakan, tetapi juga memiliki kewajiban untuk memastikan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif di tengah masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok juga dipengaruhi oleh faktor sosial masyarakat, seperti rendahnya kesadaran terhadap pentingnya pendidikan dan pola pikir masyarakat yang masih sulit menerima informasi baru mengenai kebijakan pendidikan gratis. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan masyarakat dalam menerima, memahami, dan mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah.

Dalam perspektif Siyasah Tanfiziyah, keberhasilan suatu kebijakan juga berkaitan dengan amanah pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang wajib dijamin oleh negara karena memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah berkewajiban memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat memperoleh akses pendidikan secara adil tanpa adanya diskriminasi maupun hambatan dalam memperoleh akses pendidikan.

Prinsip kemaslahatan dalam Siyasah Tanfiziyah menekankan bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat luas. Kebijakan pendidikan gratis pada dasarnya telah memberikan manfaat bagi masyarakat Nagari Lansek Kadok, terutama dalam meringankan biaya pendidikan formal. Pendidikan merupakan salah satu hak dasar yang wajib dijamin oleh negara karena memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih memerlukan evaluasi dan perbaikan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara menyeluruh.

Selain itu, dalam konsep Siyasah Tanfiziyah, pemerintah juga memiliki tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan publik. Pengawasan diperlukan agar kebijakan yang telah ditetapkan dapat berjalan sesuai tujuan serta mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pengawasan dan pendampingan terhadap siswa yang berisiko putus sekolah masih belum optimal. Kondisi tersebut dapat dilihat dari masih adanya siswa yang memutuskan untuk bekerja dan tidak melanjutkan pendidikan meskipun program pendidikan gratis telah diberlakukan. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dari pemerintah daerah, pihak sekolah, dan pemerintah nagari dalam memberikan pembinaan kepada masyarakat serta meningkatkan pengawasan terhadap keberlangsungan pendidikan anak.

Dengan demikian, tinjauan Siyasah Tanfiziyah terhadap implementasi kebijakan pendidikan gratis di Nagari Lansek Kadok menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya menjalankan tanggung jawabnya melalui penyediaan pendidikan gratis. Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut masih belum sepenuhnya merealisasikan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah secara optimal. Oleh sebab itu, perlu adanya penguatan kerja sama antara pemerintah daerah, pemerintah nagari, pihak sekolah, dan masyarakat agar pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis dapat berlangsung lebih efektif serta

mampu menekan angka putus sekolah di Nagari Lansek Kadok. Penelitian ini terbatas pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis di Nagari Lansek Kadok pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain maupun jenjang pendidikan yang berbeda karena karakteristik sosial, ekonomi, dan kondisi daerah yang tidak sama.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di Nagari Lansek Kadok, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, penelitian menggunakan pendekatan kualitatif sehingga hasil penelitian menggambarkan kondisi berdasarkan data empiris pada lokasi penelitian dan belum dapat digeneralisasikan ke daerah lain yang memiliki karakteristik sosial, geografis, serta pelaksanaan kebijakan yang berbeda. Oleh karena itu, hasil penelitian ini perlu dipahami sesuai dengan ruang lingkup dan konteks penelitian yang telah ditetapkan.

## KESIMPULAN

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis di Nagari Lansek Kadok telah terlaksana melalui pembebasan biaya pendidikan dan dukungan operasional sekolah, tetapi belum optimal karena angka putus sekolah masih tinggi. Pelaksanaannya dipengaruhi oleh faktor rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya sosialisasi, kondisi geografis, keterbatasan sarana, serta belum optimalnya koordinasi antarpemangku kepentingan. Dalam perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak pendidikan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sosialisasi, koordinasi, dan peran pemerintah nagari agar tujuan pemerataan pendidikan serta penurunan angka putus sekolah dapat tercapai secara optimal.

Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara, kebijakan publik, dan *Siyasah Tanfiziyah*, dengan memberikan gambaran empiris mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pendidikan Gratis di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini memperkaya kajian mengenai implementasi kebijakan publik melalui

perspektif *Siyasah Tanfiziyah*, yang menekankan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab pemerintah dalam menjamin hak masyarakat memperoleh pendidikan. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi pemerintah daerah, akademisi, dan peneliti dalam mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis serta merumuskan strategi untuk meningkatkan efektivitas implementasinya.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji implementasi kebijakan pendidikan gratis dengan cakupan wilayah yang lebih luas atau pada jenjang pendidikan yang berbeda agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut. Selain itu, penelitian berikutnya dapat mengembangkan analisis mengenai strategi peningkatan koordinasi antarpemangku kepentingan, efektivitas sosialisasi kebijakan, serta model pendampingan bagi siswa yang berisiko putus sekolah, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang lebih luas dalam mendukung keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan gratis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affriliani, A. (2025). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis dalam Mewujudkan Wajib Belajar 12 Tahun* [S1 thesis, Universitas Jambi]. <https://repository.unja.ac.id/id/eprint/76317>
- Agustin, A., Salam, M., & Utami, S. (2024). Penyebab Anak Putus Sekolah: Studi Kasus di Sanggar Kegiatan Belajar, Kecamatan Jambi Selatan, Kota Jambi. *Journal of Civic Education*, 7(1), 1–10. <https://doi.org/10.24036/jce.v7i1.1080>
- Gunawan, B. (2020). Analisis Yuridis Pendidikan Jarak Jauh dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang Dasar NRI 1945 pada Masa Pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal HAM*, 11(3), 387–404. <https://doi.org/10.30641/ham.2020.11.387-404>
- Huda, M. C. (2021). *Metode Penelitian Hukum: Pendekatan Yuridis Sosiologis*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Lorensa, D., Ramadhan, M. R., & Jabbar, A. (2024). Strategi Pemerintah Daerah dalam Penanganan Anak Putus Sekolah di Desa Latimojong Kecamatan Buntu Batu Kabupaten Enrekang. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan*, 10(4). <https://governance.lkispol.or.id/index.php/description/article/view/222>
- Maskhuroh, I. F., & Hasib, M. (2025). Faktor Penyebab Rendahnya Kesadaran Masyarakat terhadap Pendidikan di Desa Mulyosari Kecamatan Pagerwojo Kabupaten Tulungagung. *Journal of Knowledge and Collaboration*, 2(7), 726–736. <https://ojs.arbain.co.id/index.php/jkc/article/view/205>
- Muchid, M., Adiarto, Indry, & Utami, A. T. (2026). Dinamika Implementasi Kebijakan Pendidikan Gratis pada Level Sekolah Menengah Atas Pertama Negeri di Pulau Bengkalis. *Jurnal Niara*, 18(3), 783–793. <https://doi.org/10.31849/vnm54w72>

- Nureni, N., Syahriral, S., Firdaus, F., & Azis, A. (2026). Perlindungan Hukum terhadap Hak Pendidikan Anak di Indonesia. *Jurnal Tana Mana*, 7(1), 328–334. <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/view/1575>
- Pujangga, R., Edi, R. N., & Santoso, R. (2025). Tinjauan Fiqh Siyāsah terhadap Implementasi Hukum Adat dalam Sistem Perundang-Undangan Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Jurnal Inovasi Hukum*, 6(2). <https://ejournals.com/ojs/index.php/jih/article/download/1657/2011/6517>
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(1), 48–60. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sadia, H., Mustari, N., Nurmaeta, S., & Razak, F. S. H. (2019). Strategi Pemerintah dalam Pengembangan Kapasitas Program Pendidikan Gratis di Kabupaten Bone. *Journal of Public Administration and Government*, 1(1), 39–45. <https://doi.org/10.22487/jpag.v1i1.16>
- Sanda P. H., F., & Gistituati, N. (2023). Evaluasi Implementasi Program Pendidikan Gratis di Kota Padang Sidempuan. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(1), 195–204. <https://doi.org/10.29210/1202322770>
- Saputra, R. P. (2025). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting di Kabupaten Lampung Utara dalam Tinjauan Siyāsah Tanfiziyah: Studi di Desa Mulang Maya. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, 5(1), 406–428. <https://doi.org/10.14421/dt861n76>
- Sasmiharti, J. (2023). Manfaat Sosial Ekonomi dari Pendidikan Gratis di Masyarakat. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(1), 57–62. <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/16954>
- Sulfiani, B., Nurhayati, Astuti, N. S., Sulfiana, Ardani, M. C. P. A., Hasrianti, Arif, M. F. D., & Panessai, M. K. R. (2025). Analisis Faktor Ekonomi yang Mempengaruhi Jutaan Anak Putus Sekolah Pendidikan Dasar Indonesia. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(03), 400–411. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/pendas/article/view/29166>
- Sulung, U., & Muspawi, M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier. *Edu Research*, 5(3), 110–116. <https://iicls.org/index.php/jer/article/view/238>
- Susanto, T. T. D., Malyka, A., Fauzi, H., Faradisa, N., Rifatul, N., & Malfanda, T. (2025). Biaya Tersembunyi dan Ketimpangan Akses Pendidikan di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Dampak Sosial-Ekonomi. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 3(4), 3282–3288. <https://doi.org/10.31004/jerkin.v3i4.1021>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/v37nrw32>
- Vilanti, F. A., Hanapi, M. H., Viola, M. A., & Pratama, L. (2026). Implementasi Kebijakan Pemerataan Pendidikan dalam Mengatasi Ketimpangan Akses di Daerah Terpencil. *Education Library*, 3(1). <https://online-journal.unja.ac.id/edlib/article/view/50054>